	No. Alumnus of University:	MUHAMMAD AL JIHAD	No. Alumnus of Faculty:
	a) Place/Date of Birth : Padang Panjang / 2 June 1994 b) Name of Parents : Drs. Trinov and Dra. Ideal Mesra c) Faculty : Law d) Major Programme : International Law (MP VII) e) Student ID : 1210113136	f) Graduation Date : 21 April 2016 g) Duration of Study : 3 Years 8 Month h) Predicate Graduated : Very Satisfactory i) GPA : 3,45 j) Address : K.H. A Dahlan Street Number 16B, Guguk Malintang, Padang Panjang	

**REGULATION OF DRONE (UNMANNED AIRCRAFT) IN
INTERNATIONAL AND NATIONAL AIR LAW**

(Muhammad Al Jihad, 1210113136, International Law (MP VII), Law Faculty of Andalas University,
Year 2016, 70 pages)

ABSTRACT

Air Law as the study of the laws is regulating everything that relating to aviation, including aircraft increasingly prevalent discussed in the national and international field. This is because the air law is the law of relatively new and developing. As one object of legal studies of air, aircraft is reregulated in order to achieve justicy, expediency, legal security and in order to bring aviation safety. In the technological era, the aircraft developed to be flown without a pilot (unmanned) on board, or known as drone/ Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA). Such developing make inquiries regarding the legal status of drone aircraft as. As the chief international air law, Chicago Convention 1944 has been familiar with the term "pilotless aircraft", as contained in Article 8 of the Convention. Furthermore, in the air law of Indonesia, drone is regulated at the level of Regulation of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 90/2015. This method of research used juridicial normative by analytical descriptive study to describe the legal status and rules of drone in international and national air law. So that it is known in the field of international air law was normative regulates only for the regulation of drones, whereas Regulation of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 90/2015 is providing administrative law for rule of drone only.

Keywords: drone, regulation, air law.

This graduation thesis has been defended in front of the team of examiner and passed on 21 April 2016. Abstract has been approved by the examiners.

Examiners

Signature	1.	2.
Bright Name	Prof. H. Firman Hasan, S.H., L.L.M.	Dr. Ferdi, S.H., M.H.


Knowing,

Chairman of International Law Department : **Magdariza, S.H., M.H.**

Signature

Alumnus have signed up to the Faculty/ University and got the alumnus number:

No. Alumnus of Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumnus of University:	Name:	Signature:

	No. Alumni Universitas:	MUHAMMAD AL JIHAD	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang / 2 Juni 1994 b) Nama Orang Tua : Drs. Trinov dan Dra. Ideal Mesra c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VII) e) No. BP : 1210113136	f) Tanggal Lulus : 21 April 2016 g) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,45 j) Alamat : Jl. K.H. A Dahlan No.16B, Guguk Malintang, Padang Panjang	

PENGATURAN *DRONE* (PESAWAT UDARA TANPA AWAK) DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL DAN HUKUM UDARA NASIONAL

(Muhammad Al Jihad, 1210113136, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2016, 70 halaman)

ABSTRAK

Hukum Udara sebagai kajian hukum yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan penerbangan termasuk pesawat udara semakin marak di bahas di lingkungan internasional dan nasional. Hal tersebut karena hukum udara bisa dikatakan hukum yang relatif baru dan sedang berkembang. Sebagai salah satu objek kajian hukum udara, pesawat udara diatur sedemikian rupa demi mencapai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan demi mewujudkan keselamatan penerbangan. Pada era teknologi ini, pesawat udara dikembangkan agar dapat diterbangkan dari jarak jauh tanpa harus dikendarai oleh sang pilot (nir awak), atau yang dikenal dengan istilah *drone*/ Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA). Teknologi yang demikian membuat pertanyaan terkait status legalitas *drone* sebagai pesawat udara. Namun, sebagai payung hukum udara internasional, Konvensi Chicago 1944 telah mengenal *drone* dengan istilah *pilotless aircraft* sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 Konvensi. Selanjutnya ditingkat nasional *drone* diatur dalam tataran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 (Permenhub 90/2015). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analistis yang bertujuan untuk mendeskripsikan status dan pengaturan *drone* sebagai salah satu pengembangan pesawat udara dalam lingkungan hukum udara internasional dan hukum udara nasional. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam lingkungan hukum udara internasional hanya bersifat normatif dan dalam tahap pengembangan hukum untuk pengaturan *drone*, sedangkan di tingkat nasional Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sama sekali tidak mengatur *drone* atau PUTA, Permenhub 90/2015 hanya menyediakan aturan mengenai *drone* yang bersifat administratif.

Kata kunci: *drone*, pengaturan, hukum udara.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 April 2016
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Prof. H. Firman Hasan, S.H., L.L.M.	Dr. Ferdi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Magdariza, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

